

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1 Teori Ketimpangan Pendapatan

Menurut Mudjarad Kuncoro (2013) ada dua jenis ketimpangan yang menjadi pusat perhatian. Pertama, ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini dan berapa kue nasional yang dinikmati 40 persen golongan pendapatan terendah. Semakin besar perbedaan distribusi pendapatan yang terjadi mencerminkan semakin tingginya angka Indeks Gini dalam suatu wilayah atau negara. Kedua, ketimpangan antar daerah seperti di Indonesia penting untuk diteliti karena salah satu faktor gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi secara geografis ke kawasan Barat Indonesia selama lebih dari lima dasawarsa terakhir.

Menurut Ganie-Rochman (2013) ada tiga bentuk ketimpangan yang ada. Pertama, ketimpangan sebagai gambaran distribusi hasil pembangunan. Besar atau kecil angka ketimpangan menunjukkan berapa persen penduduk dalam strata pendapatan atas, menengah, dan rendah menguasai aset dalam pembangunan. Ketimpangan dalam bentuk ini hanya memberi gambaran persentase sedangkan arti dan akibat ketimpangan dalam suatu negara belum terlihat seperti angka ketimpangan tinggi terjadi di negara berpendapatan (PDB) cukup tinggi dengan angka orang miskin cukup tinggi.

Bentuk ketimpangan kedua adalah ketimpangan antar sektor dengan tingkat pertumbuhan tinggi atau sektor yang menjadi basis ekonomi kelas menengah – atas.

Kegiatan ekonomi kelas menengah – atas dengan kegiatan ekonomi kelas bawah juga menjadi faktor yang mempengaruhi ketimpangan tersebut. Ketimpangan dalam bentuk ini menganalisis sektor ekonomi secara luas dalam masyarakat seperti seberapa jauh masyarakat kelas atas mendapat kemudahan dalam kebijakan pemerintah.

Ketiga, bentuk ketimpangan dilihat dari karakter pelayanan publik. Ketimpangan muncul karena pelayanan publik yang buruk bagi kalangan bawah seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih dan akses kredit. Bentuk ketimpangan dalam pelayanan publik menganalisis kesesuaian dan kualitas seperti ketimpangan dalam pendidikan. Sekolah seperti apa yang disediakan bagi golongan miskin, apakah sesuai kebutuhan untuk menghadapi tantangan hidup mereka, apakah sekolah keterampilan sebagai alternatif sekolah umum sudah tersedia dan relevan dengan kebutuhan.

Penelitian yang akan dilakukan mengarah pada ketimpangan pendapatan, umumnya menggunakan Indeks Gini sebagai indikator ukurnya. Menurut Tadaro (2003) ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Ada dua ukuran ketimpangan pendapatan yaitu dengan Indeks Gini dan Kurva Lorenz.

1. Indeks Gini

Indeks Gini dikenal juga dengan koefisien Gini. Indeks Gini dapat menunjukkan ketidaksetaraan melalui alat analisis rasio seperti pendapatan per kapita dan Produk Domestik Bruto. Selain itu, Indeks Gini dapat digunakan untuk mengukur tingkat

ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk di berbagai sektor dan negara. Indek Gini dapat menunjukkan perubahan distribusi pendapatan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu, sehingga dapat menunjukkan peningkatan atau penurunan dari ketimpangan pendapatan di suatu negara tersebut.

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Keterangan:

G = Gini Ratio

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke- i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke- i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke- $i-1$

k = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Indek Gini dari angka 0 atau 0% hingga angka 1 atau 100%. Nilai 0 (nol) mengisyaratkan adanya pemerataan yang sempurna. Sementara nilai 1 (satu) mencerminkan ketimpangan yang sempurna. Di atas nilai satu secara teoretis mewakili penghasilan atau kekayaan yang negatif. Semakin tinggi Indek Gini, semakin tinggi pula ketimpangan yang ditunjukkan. Ini artinya, penduduk dengan *income* tinggi akan menerima angka persentase yang jauh lebih tinggi pula dari total *income* seluruh penduduk yang ada dalam suatu wilayah tertentu.

2.1.2 Indeks Demokrasi

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Whitehead (1989 dalam Zuhro, 2019) demokrasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main demokrasi. Demokrasi tidak hanya proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga-lembaga politik, tetapi juga level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi bila aktor-aktor politik, ekonomi, negara, masyarakat sipil mampu mengedepankan tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Demokrasi yang berlangsung di daerah-daerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya demokrasi di tingkat nasional.

Menurut Sorensen (2003 dalam Ibrahim, 2007) ada empat prakondisi bagi perkembangan demokrasi. Pertama, modernisasi dan kesejahteraan akan menjadi iklim kondusif bagi perkembangan demokrasi. Kedua, budaya politik yang mengindikasikan sistem nilai dan keyakinan yang menjelaskan makna dan tindakan. Ketiga, struktur sosial masyarakat, yakni kelas dan kelompok tertentu perlu diidentifikasi. Kecendrungan menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan kelas penduduk penduduk kota yang besar dan independen sebagai kunci dari pengembangan demokrasi. Keempat, faktor eksternal, yakni faktor ekonomi, politik ideologi, dan elemen – elemen lain yang merupakan konteks internasional dari proses yang terjadi di suatu negara.

Demokrasi di suatu negara diukur menggunakan suatu indek yang dikenal dengan Indek Demokrasi. Demokrasi di Indonesia diukur dengan menggunakan

Indek Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. IDI mengkuantifikasi semua aspek pengukuran dan menerjemahkannya dalam bentuk persentase. Ada tiga aspek yang diukur oleh IDI, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek kelembagaan demokrasi. Tiga aspek ini dijabarkan dalam 11 variabel dan diterjemahkan menjadi kurang lebih 28 indikator (BPS, 2021).

Variabel Indek Demokrasi terdiri atas kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, Peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, dan Peran peradilan yang independen.

Indikator yang digunakan dalam mengukur Indek Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu:

- Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
- Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.
- Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.
- Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
- Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama.

- Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama.
- Ancaman/ penggunaan kekerasan dari suatu kelompok terkait ajaran agama.
- Aturan tertulis yang diskriminatif dalam gender, etnis, kelompok.
- Tindakan/ pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok.
- Ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok.
- Hak memilih atau dipilih terhambat.
- Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih.
- Kualitas daftar pemilih tetap (DPT).
- *Voters Turnout*
- Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi.
- Demonstrasi/ mogok yang bersifat kekerasan.
- Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah.
- Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu.
- Kecurangan dalam penghitungan suara.
- Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.
- Perda yang merupakan inisiatif DPRD.
- Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.
- Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu.
- Persentase perempuan pengurus partai politik.

- Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN.
- Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/perpol tertentu dalam pemilu legislatif satu.
- Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.
- Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif satu.
- Keputusan hakim yang kontroversial.
- Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Sember : BPS, 2021

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto atau yang biasa di singkat PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Akumulasi dari nilai semua sektor perekonomian di wilayah tertentu disebut dengan produk domestik regional bruto. Sedangkan untuk melakukan penelitian data yang akan digunakan merupakan data PDRB per kapita. PDRB per kapita sendiri merupakan satu dari sekian indikator guna mengetahui serta mengukur rata-rata pendapatan per penduduk di suatu daerah dan periode tertentu. PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan yang dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah, seperti rumus di bawah ini.

$$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_t}{\Sigma Penduduk_t}$$

Keterangan:

$PDRB$ per kapita_{*i*} = PDRB per kapita kabupaten/kota *i*

$PDRB_i$ = PDRB ADHK/ADHB kabupaten/kota *i*

Σ Penduduk_{*i*} = Jumlah penduduk kabupaten/kota *i*

PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian pada suatu wilayah. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah :

- a. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.
- b. PDRB harga konstan (*riil*) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap katagori dari tahun – ketahun.
- c. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan stuktur perekonomian atau peranan setiap katagori ekonomi suatu wilayah.
- d. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB persatu orang penduduk.
- e. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu negara

2.2 Studi Terkait

Sub bab ini akan memaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya mengenai demokrasi, laju pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ekonomi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan juga memaparkan banyak kemungkinan. Nikoloski (2015) melakukan penelitian guna mempelajari hubungan antara demokrasi dan ketimpangan pendapatan dalam jangka menengah dan panjang. Data dalam penelitian tersebut merupakan data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* dengan data *time series* dalam rentang waktu tahun 1962 - 2006. Studi tersebut mempelajari hubungan antara demokrasi dan ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang dan pendek – menengah dengan menggunakan metode analisis data panel pada 77 negara untuk periode 1962-2006. Data ketimpangan pendapatan tersebut diambil dari *UN WIDER dataset* termasuk data ukuran (konsumsi dan pendapatan), tingkat agregasi (urban, rural, regional) dan perbedaan karakteristik dari angkatan kerja (usia pekerja, pekerja, dan pengangguran). Indek demokrasi menggunakan indikator *Polity IV* sebagai variabel independent utama, dan produk domestik bruto sebagai variabel independent kontrol.

Hasil dari penelitian Nikoloski menemukan bukti bahwa demokrasi dapat dikaitkan dengan distribusi pendapatan yang lebih ketat. Hasil tersebut diklaim kuat untuk teknik spesifikasi yang berbeda, dengan mengesampingkan negara-negara berkembang serta negara-negara transisi. Hasil lain yang ditemukan dalam studi tersebut adalah beberapa faktor penentu murni ketidaksetaraan ekonomi yaitu sumber daya alam, komposisi sektor ekonomi adalah sektor-sektor yang memiliki

bobot lebih sebagai penentu ketidaksetaraan pendapatan. Kesimpulan dari studi yang dilakukan oleh Nikoloski adalah mempromosikan langkah-langkah untuk pertumbuhan ekonomi berbasis tenaga kerja dan diversifikasi proses produksi dapat memiliki efek luar biasa pada penurunan ketimpangan dalam jangka panjang.

Hal itu diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh York. W.J (2017). Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi kepuasan warga negara dengan demokrasi dan berfokus pada pendapatan rumah tangga serta distribusi pendapatan. Hasil dari penelitian ini adalah penilaian warga terhadap kinerja demokratis turun ketika distribusi pendapatan suatu negara menjadi lebih tidak setara. Dalam penelitian ini juga dicantumkan beberapa hal penting yang ditemukan diantaranya: 1) Klaim bahwa meningkatnya ketimpangan pendapatan mengancam demokrasi tidak berdasar. Tidak ada bukti statistik bahwa orang kaya memperoleh kekuatan politik yang lebih besar karena bagian pendapatan nasional mereka meningkat, 2) Data opini publik menunjukkan korelasi yang kuat antara preferensi kebijakan kelas atas, menengah, dan bawah., 3) Pengaruh kelas atas dan menengah hampir identik dalam menyikapi kebijakan yang ada, 4) Fokus pada fenomena ketimpangan pendapatan yang terkait dengan politik.

Agusalim (2016) juga melakukan penelitian dengan metode dan fokus yang sedikit berbeda. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengkaji pengaruh desentralisasi dalam mendistribusikan pendapatan nasional untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan data sekunder berupa PDB sebagai representasi pendapatan nasional dan data indeks gini sebagai representasi dari tingkat ketimpangan pendapatan dengan rentang waktu

1978-2015. Menggunakan metode analisis regresi linear dengan pendekatan OLS. Variabel dependen yang digunakan adalah indek gini dan variabel independennya adalah PDB serta variabel dummy desentralisasi. Penggunaan variabel dummy desentralisasi diyakini mampu membantu pemerintah dalam mengatasi instabilitas politik terkait dengan upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pemerintahan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa desentralisasi jika dipandang dari aspek ekonomi belum mampu memperkecil ketimpangan pendapatan dimasyarakat.

Lebih lanjut, Menurut Hirawan dalam Aguslim (2016) mengemukakan bahwa desentralisasi merupakan landasan tujuan demokrasi sehingga kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk menciptakan pengambilan keputusan publik yang demokratis dan lebih baik. Sejalan dengan Akai dan Sakata dalam Apriesa dan Miyasto (2013) yang juga memperkuat temuan bahwa desentralisais fiskal dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan kesenjangan antar daerah. Dengan adanya desentralisasi, setiap daerah mampu melaksanakan demokrasi dengan lebih baik. Hal itu dikarenakan setiap daerah akan memiliki hak dalam pengambilan keputusan dan implemetasi terkait *public policy* yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat bersama. Contoh nyatanya adalah keputusan tiap daerah dalam alokasi APBD untuk pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan Bus Trans Jogja yang mampu meningkatkan mobilitas wilayah DIY secara hampir menyeluruh sehingga mempermudah akses perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas penelitian yang mungkin benar ataupun salah dan dapat dibuktikan dengan pengolahan data pada bab keempat. Jika meruntut dari tujuan penelitian dan rumusan permasalahan yang telah disusun sebelumnya, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Indek Demokrasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada tiap provinsi di Indonesia.
2. Diduga laju pertumbuhan ekonomi tiap daerah yang diwakilkan dengan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan pada tiap provinsi di Indonesia.

